JURNAL ADMINISTRASI NEGARA

Volume VII, Edisi 2, Desember 2016 ISSN: 1412-5812

PELAKSANAAN SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KANTOR CAMAT LINGGA KABUPATEN LINGGA 120-130
Rika Apriati Ningsih

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA KULINER KHAS DAERAH (STUDI DI DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN OGAN ILIR, INDONESIA 2016) 131-141
Ermanovida, Dyah Hapsari ENH, dan Andy Alfatih

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 142-161
Dwi Mirani S.IP., M.Si dan Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP

KESIAPAN LEMBAGA PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI 30 KOTA PALEMBANG 162-168
Nanda Nirmala Rahayu

AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) JAMBI TAHUN 2014 169-193
Yolanda

KUALITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH PENDUDUK PADA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN SEBERANG ULU 1 KOTA PALEMBANG 194-206
Adwiyana

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURNAL ADMINISTRASI NEGARA

ISSN: 1412-5812

Volume VII, Edisi 2, Desember 2016

Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang administrasi negara/publik.

Pengarah	:	Dekan FISIP Universitas Sriwijaya
Penanggung Jawab	:	Ermanovida, S.Sos., M.Si.
Ketua Dewan Penyunting	:	Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si.
Wakil Ketua Dewan Penyunyting	:	Dr. Raniasa Putra, M.Si.
Penyunting Pelaksana	:	Dr. Dadang H. Purnama, M.Si
Pelaksana Tata Usaha	:	Sena Putra Prabujaya. S.AP, M.AP
		Purwo Julianto
		Yuni Yunita, S.Sos

Alamat Penyunting
Kampus FISIP Universitas Sriwijaya
Jl. Lintas Timur Sumatera KM. 32, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, 30662
Telp/Fax. 0711-581572, Email: jan.fisip.unsri@gmail.com

Redaksi menerima kiriman naskah artikel dan hasil penelitian dalam bidang administrasi negara/publik. Naskah di ketik di kertas HVS A4 spasi ganda antara 15-20 halaman dengan format seperti tercantum pada halaman belakang (*lihat*, Petunjuk Penulisan Artikel). Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

DAFTAR ISI

	hal.
PELAKSANAAN SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KANTOR CAMAT LINGGA KABUPATEN LINGGA *Rika Apriati Ningsih*	120-130
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA KULINER KHAS DAERAH (STUDI DI DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN OGAN ILIR, INDONESIA 2016) *Ermanovida, Dyah Hapsari ENH, dan Andy Alfatih*	131-141
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 *Dwi Mirani S.IP., M.Si dan Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP*	142-161
KESIAPAN LEMBAGA PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI 30 KOTA PALEMBANG *Nanda Nirmala Rahayu*	162-168
AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) JAMBI TAHUN 2014 *Yolanda*	169-193
KUALITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH PENDUDUK PADA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN SEBERANG ULU 1 KOTA PALEMBANG *Adwiyana*	194-206

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2015

Dwi Mirani, S.IP., M.Si

Jurusan ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Sena Putra Prabujaya S.AP, M.AP

Jurusan ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Email: miranidwi@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan Negara maritim yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi air, namun kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia yang mengalami krisis air, terutama air minum.Masalah ini menjadi tantangan berat pemerintah ke depan. Pasalnya, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang pasti juga membutuhkan layanan akses air sistem perpipaan yang juga lebih banyak. Program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu solusi mengatasi persoalan penyediaan air oleh pemerintah. Tulisan ini akan mengangkat persoalan efektifitas pelaksanaan program air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dikota Palembang pada khususnya. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan format deskriftif. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan kepustakaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan replika program sebelumnya, yang didanai oleh APBN 2015, telah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya ketiga indikator efektifitas berupa pencapaian tujuan, adaptasi dan integrasi. Selain itu ada faktor-faktor penghambat dan pendorong efektifitas yang muncul dari program ini maupun dari lingkungan luar program. Keberlanjutan program ini terkendala oleh keterbatasan idle capacity, masalah koordinasi antar pihak dan jumlah masyarakat pengguna disesuaikan dengan anggaran yang ada. Harapannya, semua kendala dapat diatasi oleh PDAM Tirta Musi dengan bekerjasama dengan pihak terkait dalam program ini.

Kata kunci: Program Hibah air minum, masyarakat berpenghasilan rendah, efektivitas

Pendahuluan

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengupayakan pelayanan kebutuhan air bagi masyarakatnya. Kewajiban ini dimandatkan dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (3), yang berbunyi"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola, mengupayakan dan memanfaatkan air bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Walaupun Indonesia merupakan Negara maritim yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi air, namun kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia yang mengalami krisis air, terutama air minum. Selain itu, pelayanan dibidang air bersih untuk masyarakat belum sebanding dengan pertumbuhan penduduk di tanah air. Masalah ini menjadi tantangan berat pemerintah ke depan. Pasalnya, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang pasti juga membutuhkan layanan akses air sistem perpipaan yang juga lebih banyak. Disatu sisi sumber air semakin langka. Menurut Direktur Pengembangan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum, Danny Sutjiono, mengatakan sedikitnya 1.235 desa di wilayah Indonesia berstatus rawan air minum. Menurut dia, secara umum lokasi rawan air disebabkan tidak terdapat sumber air baku. Danny mengatakan jumlah desa kering dalam kawasan rawan air tersebut berdasarkan data kekeringan desa yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2013. Disatu sisi sumber air semakin langka. Menurut Direktur Pengembangan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum, Danny Sutjiono, mengatakan sedikitnya 1.235 desa di wilayah Indonesia berstatus rawan air minum. Menurut dia, secara umum lokasi rawan air disebabkan tidak terdapat sumber air baku. Danny mengatakan jumlah desa kering dalam kawasan rawan air tersebut berdasarkan data kekeringan desa yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2013.

Untuk memetakan persoalan yang ada, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU telah membagi desa kering di kawasan rawan air tersebut ke dalam tiga prioritas penanganan. Sebanyak 326 desa kering di kawasan rawan air masuk dalam penanganan prioritas pertama. Adapun prioritas kedua sebanyak 773 desa, dan prioritas penanganan ketiga sebanyak 136 desa.Saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya sedang menangani sebanyak 32 desa kering di kawasan rawan air yang masuk dalam prioritas penanganan pertama yang tersebar di 21 kabupaten. Penanganan juga dilakukan terhadap 56 desa yang masuk dalam prioritas dua dan 16 desa yang masuk dalam prioritas ketiga. (*www.nawasis.com*)

Untuk mengatasi persoalan yang muncul pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa beberapa program di antaranya program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR), SPAM di ibu kota Kecamatan (IKK), SPAM Regional, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan pembangunan Embung Penampung Air Hujan.

Tahun 2010, Pemerintah Australia mengajukan program kerjasama dalam hal pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat Indonesia. Program ini bernama Program Hibah Air Minum dan Sanitasi. Program ini merupakan komitmen pemerintah Australia untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, guna membantu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Program ini dibagi kedalam beberapa tahapan. Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Tahap I merupakan program hibah bantuan dari Pemerintah Australia yang sudah dilaksanakan pada tahun 2010 – 2011. Program ini diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang telah melakukan investasi terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada PDAM dan PDPAL, selanjutnya PDAM dan PDPAL akan melaksanakan pembangunan Sambungan Rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dana bantuan AusAid yang diberikan sebesar AUS$ 20 juta di 34 kabupaten/kota. Program ini telah berhasil membangun sebanyak 77.000 sambungan rumah (SR).Program air minum dan sanitasi ini diimplementasikan atas Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII). Persiapan dan pelaksanaannya dilakukan Bappenas, bekerjasama dengan Ditjen Cipta Karya dan Kementerian Keuangan. Untuk Program tahap ke II, dilaksanakan di tahun 2012-2015dengan menaikkan target menjadi 300.000 SR dan masih dibantu dana dari pemerintah Australia sebesar AUS$ 80 juta.Program hibah air minum tahap II ini juga mendapatkan tambahan dana bantuan dari pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui USAID sebesar US$ 10 juta.Dana tersebut diharapkan dapat tersalurkan untuk membangun 37.899 SR di 27 kab/kota. Ditahun 2015, pemerintah juga menganggarkan dana program ini berasal dari APBN, sebesar 500 milyar rupiah dengan target 426,2 milyar rupiah untuk 144.809 SR di 87 Kab/Kota. *(http://www.ampl.or.id)*

Menurut Djoko Kirmanto (Menteri Pekerjaan Umum, kabinet bersatu), pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas air bersih dan manajemen dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta keuangan. Bantuan dari hibah Australia mencapai angka 5,15 triliun rupiah untuk program penyediaan saluran air bersih.Pemerintah

menyediakan dana sebesar 3,7 triliun rupiah untuk kredit investasi bagi PDAM se-Indonesia.Saat ini di Indonesia terdapat 132 PDAM yang sehat dan pantas menjadi contoh baru 320 perusahaan air minum lainnya yang dalam kondisi buruk.Di Sumsel ada dua PDAM yang dapat menjadi contoh karena berhasil menjadi sehat, masing-masing PDAM Tirta Musi Kota Palembang dan PDAM Muara Enim, di Kabupaten Muara Enim Sumsel. (*www.ampl.com)*

Program Hibah Air minum di Sumatera Selatan awalnya diberikan kepada PDAM Tirta Musi Palembang dan PDAM Muara Enim. Kota Palembang terpilih karena dinilai pemerintah Australia cukup serius dalam memberikan pelayanan air bersih kepada warganya yakni mencapai 96,07 persen dari total jumlah penduduk sekitar 1.493.146 jiwa dengan luas wilayah 369,22 km2. Program hibah ini diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Palembang (5000 KK) dan Kabupaten Muara Enim (1000 KK) yang masing-masing tersebar di 10 kecamatan dan 5 kecamatan. Adapun 10 Kecamatan dimaksud yakni Ilir Barat 1 dan 2, Ilir Timur 1 dan 2, Kalidoni, sukamaju, Seberang Ulu, Kertapati, Gandus, Sematang Borang. Sedangkan 5 Kecamatan di Muara Enim yaitu Sungai Rotan, Beringin, Pulau Panggung, Ujanmas dan Gunung Megang.

Pelaksanaan program ini dimulai dari persetujuan perencanaan *baseline survey.* Kemudian Pemerintah Kota/Kabupaten memberikan modal penyertaan kepada PDAM untuk pekerjaan SR. Setelah berfungsi baik lalu diverifikasi oleh Ditjen Cipta Karya. Dari hasil verifikasi Pemkot.Kabupaten mengajukan permintaan pembayaran dana hibah melalui Kementerian Keuangan disertai persyaratan dokumen lainnya. Program hibah ini memberikan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan potongan harga 73% untuk penyambungan pipa baru senilai 300.000 rupiah sambungan dengan tarif normal senilai 1.100.000 rupiah. Setelah MBR membayar tunai mereka dapat langsung menikmati air bersih dari PDAM Tirta Musi. Namun apabila program ini selesai, maka tarif akan kembali normal.

Program hibah ini diberikan berdasarkan pencapaian kinerja dilihat dari jumlah dan kualitas sambungan rumah yang terpasang.Program hibah air minum merupakan stimulan bagi pemerintah daerah untuk bisa mengurangi kapasitas air yang tidak terpakai (*idle capacity*). Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah memenuhi capaian *Millenium Development Goal's (MDG's)* 2015 sebesar 68,87 persen. Program ini dapat

terus berkelanjutan dan dapat di replika asal ada dana yang dianggarkan pemerintah.

Hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan hibah air minum tahap I APBN 2015 oleh Kementerian PU yang mengangkat permasalahan perlunya koordinasi yang lebih intensif antar pihak di daerah dan Pusat dan perlunya perencanaan yang baik dari PDAM khususnya terkait akurasi data MBR. Permasalahan lain muncul dari pihak Pemda berupa belum adanya Perda Penyertaan modal (PMP) yang menjadi syarat untuk mendapatkan program hibah ini kalaupun ada PMP dialokasikan pada APBDP 2015. Pada saat pelaksanaan, pemasangan pipa SR baru dapat dipasang apabila masyarakat mendaftar ulang sehingga pengerjaan sambungan pipa harus menunggu dulu, hal ini memperlambat proses pengerjaan. Selain itu, persyaratan untuk penerima hibah hanya mengandalkan rekening listrik saja tanpa pertimbangan lain. Selain itu, Untuk dapat menerima program ini masyarakat harus bersedia membayar sesuai dengan ketentuan PDAM, Informasi awal yang diperoleh melalui website PU, program ini hanya mensubsidi pemasangan pipa baru atau disebut Sambungan Rumah saja (SR) bukan mensubsidi pembayaran masyarakat perbulan. Asumsi yang kemudian muncul, masyarakat mendapatkan kemudahan di awal, namun untuk pembayaran selanjutnya sesuai pemakaian masing-masing, sehingga dapat memberatkan masyarakat apabila bebannya menjadi mahal. (*www:prohamsan.com*). Di samping beberapa permasalahan tersebut yang dialami sendiri peneliti, air minum yang dialirkan PDAM terkadang kualitasnya masih rendah, warnanya terkadang kuning dan bau kaporit padahal tarif nya mahal. Lalu bagaimana dengan kualitas bagi MBR apakah jauh lebih baik atau buruk. apakah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi sasaran program ini benar-benar terfasilitasi dan mendapatkan manfaat dari program ini.

Tinjauan Pustaka

Pengertian efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya "*Manajemen Kinerja Sektor Publik*" mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, atau kegiatan"

(Mahmudi, 2005:92). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu kegiatan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Caster I. Bernard, efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama (Bernard, 1992:207).

Selanjutnya Untuk mengukur efektifitas menurut Duncan (dalam Steers: 1985:53) yaitu;

1. Pencapaian Tujuan
   Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu : 1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, 2) Sasaran yang merupakan target kongkrit, dan 3) Dasar hukum;
2. Integrasi
   Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut pada proses sosialisasi;
3. Adaptasi
   Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adapun beberapa faktor dalam adaptasi, yaitu : 1) Peningkatan kemampuan, dan 2) Sarana dan prasarana;

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan ketiga ukuran yang dikemukakan oleh Duncansebagai alat ukur efektivitas Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Palembang.

Selanjutnya, banyak rangkaian kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas organisasi, akan tetapi dalam tulisan ini akan dibahas empat faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas (Steers,1985: 8) antara lain;

1. Karakteristik Organisasi
   Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. Struktur diartikan sebagai

hubungan yang relatif tetap sifatnya, merupakan cara suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi faktor-faktor seperti desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar pribadi dan seterusnya. Secara singkat struktur diartikan sebagai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Teknologi menyangkut mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanisme yang digunakan dalam produksi, variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran. Ciri organisasi yang berupa struktur organisasi meliputi faktor luasnya desentralisasi. Faktor ini akan mengatur atau menentukan sampai sejauh mana para anggota organisasi dapat mengambil keputusan. Faktor lainnya yaitu spesialisasi pekerjaan yang membuka peluang bagi para pekerja untuk mengembangkan diri dalam bidang keahliannya sehingga tidak mengekang daya inovasi mereka.

Faktor formalisasi berhubungan dengan tingkat adaptasi organisasi terhadap lingkungan yang selalu berubah, semakin formal suatu organisasi semakin sulit organisasi tersebut untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Hal tersebut berpengaruh terhadap efektivitas organisasi karena faktor tersebut menyangkut para pekerja yang cenderung lebih terikat pada organisasi dan merasa lebih puas jika mereka mempunyai kesempatan mendapat tanggung jawab yang lebih besar dan mengandung lebih banyak variasi jika peraturan dan ketentuan yang ada dibatasi seminimal mungkin.

Harvey (dalam Steers, 1985: 99) menemukan bahwa semakin canggih teknologi sebuah organisasi, makin tinggi pula tingkat penstrukturannya yaitu tingkat spesialisasi, sentralisasi, spesifikasi tugas dan lain-lain. Efektivitas organisasi sebagian besar merupakan hasil bagaimana organisasi dapat sukses memadukan teknologi dengan struktur yang tepat. Keselarasan antara struktur dan teknologi yang

digunakan sangat mendukung terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2) Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan ini mencakup dua aspek yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal dikenal sebagai iklim organisasi. Yang meliputi macam-macam atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi dan efektivitas khususnya atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas khususnya atribut diukur pada tingkat individual. Lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul dari luar batas organisasi yang memperngaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi seperti kondisi ekonomi, pasar dan peraturan pemerintah. Hal ini mempengaruhi: derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan derajat kestabilan lingkungan.

Steers (1985: 111) menyimpulkan dari penelitian yang dilakukan para ahli bahwa keterdugaan, persepsi dan reasionalitas merupakan faktor penting yang mempengaruhi hubungan lingkungan. Dalam hubungan terdapat suatu pola dimana tingkat keterdugaan dari keadaam lingkungan disaring oleh para pengambil keputusan dalam organisasi melalui ketetapan persepsi yang tepat mengenai lingkungan dan pengambilan keputusan yang sangat rasional dapat memberikan sumbangan terhadap efektivitas organisasi.

3) Karakteristik Pekerja

Karakteristik pekerja berhubungan dengan perbedaan peran individu para pekerja dalam hubungan dengan efektivitas. Para individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi sifat pekerja ini yang dapat menyebabkan perilaku orang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi. Dua hal tersebut adalah rasa keterikatan terhadap organisasi dan prestasi kerja individu.

Menurut Katz dan Kahn (dalam Steers, 1985: 135) peranan tingkah laku dalam efektivitas organisasi harus memenuhi tiga persyaratan sebagai berikut:

a. Setiap organisasi harus mampu membawa dan mempertahankan suatu tim kerja yang mantap yang muncul dari pegawai pria dan wanita yang terampil. Itu berarti disamping mengadakan penerimaan dari penempatan pegawai, organisasi juga harus mampu memelihara para pekerja dengan imbalan yang pantas dan memadai sesuai dengan kontribusi individu dan yang relevan bagi pemuasan kebutuhan individu.

b. Organisasi harus dapat menikmati prestasi peranan yang dapat diandalkan dari para pekerjanya. Sering terjadi manajer puncak yang seharusnya memikul tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan perusahaan, membuang terlalu banyak waktu untuk keputusan dan kegiatan sehari-hari yang sepele dan mungkin menarik, akan tetapi tidak relevan dengan perannya sehingga berkurang waktu yang tersedia bagi kegiatan ke arah tujuan yang lebih tepat. Setiap anggota bukan hanya harus bersedia berkarya, tetapi juga harus bersedia melaksanakan tugas khusus yang menjadi tanggung jawab utamanya.

Disamping prestasi peranan yang dapat diandalkan organisasi yang efektif menuntut agar para pekerja mengusahakan bentuk tingkah laku yang spontan dan inovatif, *job description* tidak akan dapat secara mendetail merumuskan apa yang mereka kerjakan setiap saat, karena bila terjadi keadaan darurat atau luar biasa individu harus mampu bertindak atas inisiatif sendiri dan atau mengambil keputusan dan mengadakan tanggapan terhadap yang paling baik bagi organisasinya.

4) Kebijakan dan praktek manajemen

Karena manajer memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditujukan ke arah sasaran. Kebijakan yang baik adalah kebijakan tersebut secara jelas membawa kita ke arah tujuan yang diinginkan. Kebijakan harus dipahami tidak berarti bahwa

kebijakan harus ditulis (Amstrong, 1993: 49). Pada intinya manajemen adalah tentang memutuskan apa yang harus dilakukan kemudian melaksanakannya melalui orang-orang (Amstrong, 1993: 14). Definisi ini menekankan bahwa dalam organisasi merupakan sumber daya terpenting. Dari faktor kebijakan dan praktek manajemen ini, sedikitnya diindentifikasikan menjadi enam variabel yang menyumbang efektivitas yaitu: 1) penyusunan tujuan strategis, 2) pencarian dan pemanfaatan sumber daya, 3) menciptakan lingkungan prestasi, 4) proses komunikasi, 5) kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan 6) inovasi dan adaptasi.

b. Cakupan program

Program Hibah Air Minum adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan*output based*atau berdasarkan kinerja yang terukur. Program Hibah Air Minum yang dimaksud di sini adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik yang bersumber dari pendapatan murni APBN atau pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Hibah Air Minum ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada pemprov atau pemkab/pemkot untuk dapat melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum di daerahnya. Pelaksanaan Program Hibah Air Minum akan menggunakan mekanisme sesuai dengan PMK No. 188/PMK.07/2012 tentang *Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah*dan/atau Peraturan Perundangan-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah. Program ini akan dikelola oleh Komite Pemerintah yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta dibantu oleh *Central Project Management Unit* (CPMU) dan *Provincial Project Management Unit* (PPMU). Kabupaten/Kota yang akan mendapatkan dana hibah program ini, perlu membentuk tim *Project Implementation Unit* (PIU) yang akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan program di masing-masing wilayahnya. (*www.prohamsan.com*)

Dalam rangka pelaksanaan Program Hibah Air Minum, pemerintah daerah penerima hibah wajib mengalokasikan dana modal APBD kepada PDAM untuk pembangunan sistem penyediaan air minum perpipaan, yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengawasan sampai penerima manfaat memperoleh pelayanan air minum dengan melaksanakan pemasangan sambungan baru yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Replikasi Program

Dalam upaya melestarikan program secara berkelanjutan. maka pada tahun berikutnya diharapkan pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dapat dilanjutkan dengan replikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi di masing - masing Kabupaten / Kota. Tujuan Replikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi yaitu Sebagai salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat pencapaian *target Water Supply and Sanitation - Millenium Development Goal (*WSS-*DMG*), melalui penetapan Kerangka Kebijakan Nasional Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat; Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi bagi masyarakat di daerahnya. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola sarana air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat.

Maksud dan tujuan dari replika program hibah air minum ini adalahMemperluas cakupan wilayah melalui pelaksanaan program sejenis di kabupaten/ kota yang lain yang secara teknik dan kualitas yang sama dengan Program Hibah Air Minum. Replikasi Program Hibah Air Minum ini dilaksanakan mulai tahun 2013.Dengan kata lain, setelah Program Hibah Air Minum Tahap I sukses dilaksanakan (untuk selanjutnya menjadi contoh untuk direplikasi).

Metode penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif.dengan format deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang dengan objek penelitian

Pelaksanaan program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota Palembang tahun 2015 yang berada dibawah Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Program ini dilaksanakan oleh PDAM Tirta Musi kota Palembang

Beberapa definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Efektivitas adalah keberhasilan suatu aktifitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, baik yang dilaksanakan secara individu, kelompok, organisasi, lembaga maupun instansi
b. Program Hibah Air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dikota Palembang adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik yang bersumber dari pendapatan murni APBN atau pinjaman dan/atau hibah luar negeri bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota Palembang tahun 2015
c. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh bantuan program hibah air minum di kota Palembangtahun 2015
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi: adalah faktor-faktor yang secara potensial dapat mendukung dan atau menghambat pelaksanaan program Hibah Air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dikota Palembang tahun 2015;

Penelitian ini difokuskan pada Efektifitas Pelaksanaan Program Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Palembang tahun 2015dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas. teknik pengumpulan data yang diambil oleh peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.Observasi dilakukan dengan datang langsung ke 5 lokasi masyarakat yang mendapat program hibah air minum MBR, wawancara dilakukan dengan informan sebanyak 24 orang dari informan kunci yaitu pimpinan dan pelaksana program hibah air minum serta masyarakat dan tokoh masyarakat di lingkungan penerima hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 5 kecamatan di kota Palembang. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi: uji derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan *(transferability*),

ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).Teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kategori triangulasi teknik pengumpulan data.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Efektifitas Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Palembang Tahun 2015

Pada bagian ini penulis melakukan pembahasan terhadap efektifitas pelaksanaan program Hibah Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota Palembang tahun 2015. Pendeskripsian tentang efektifitas ini dilihat dengan menggunakan teori Duncan yang memiliki 3 indikator, yaitu; pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi. Selanjutnya pembahasan dilakukan secara mendalam per indikator. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut;

1. Analisis Pencapaian Tujuan

Tujuan dari program ini untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. Hibah diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemasangan sambungan air minum perpipaan dan prasarana pendukungnya yang dikelola oleh PDAM dan memnuhi kriteria penerima hibah.

a. Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan program hibah air minum tahun 2015 ini dilaksanakan tiap tahunnya sudah terjadwal dari PUCipta Karya. Pada awalnya, sebelum hibah air minum APBN jadwal lebih panjang. Satu proyek bisa dilaksanakan 2 tahun. Namun sejak program hibah APBN 2015 maka jadwal harus selesai dalam satu tahun anggaran/per tahun. jika tidak bisa diselesaikan lewat dari tahun schedule, tidak akan ada pencairan dana. Dalam hal proses pengajuan dan dikabulkannya hibah bagi masyarakat satu dengan lain tidak sama ada yang lama lebih dari 1 tahun ada yang beberapa bulan.

b. Sasaran Program hibah air minum MBR

Sasaran dari program hibah MBR ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah seperti; tukang becak, buruh atau pemulung. Persyaratan yang harus dipenuhi

berupa rekening listrik, untuk listrik kapasitas dibawah 1300 watt ke bawah, tipe bangunan 54 ke bawah dan kualitas bangunan. Melalui proses seleksi dari unit, dan ada konsultan dari pusat yang dikirim menverifikasi calon pelanggan untuk dapat diusulkan masuk program MBR. Masyarakat membayar pemasangan meteran baru yang seharusnya pemasangan awal satu juta seratus ribu, tetapi disubsidi menjadi tiga ratus ribu. Biaya pemakaian awal lima puluh sampai enam puluh ribu rupiah disamaratakan bagi semua pelanggan MBR. Berikut ini Tabel penerima manfaat program hibah MBR.

Tabel 1. Daftar Penerima manfaat program hibah APBN 2015 di kota Palembang

No	KECAMATAN	JUMLAH PENERIMA
01	Kecamatan Alang-Alang Lebar	18
02	Kecamatan Gandus	200
03	Kecamatan Ilir Barat I Kecamatan Ilir Barat II	44
04	Kecamatan Ilir Timur I Kecamatan Ilir Timur II	57
05	Kecamatan Kalidoni Kecamatan Kemuning	3
06	Kecamatan Kertapati Kecamatan Sako	29
07	Kecamatan Seberang Ulu I	190
08	Kecamatan Seberang Ulu II	5
09	Kecamatan Sematang Borang	89
10	Kecamatan Plaju	179
11	Kecamatan Sukarame	260
12		64
13		60
14		99
15		16
	Total	1313

Sumber : data sekunder, PDAM Tirta Musi, Palembang, 2016

c. Dasar hukum program hibah air minum

Dasar hukum pelaksanaan hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dikota Palembang adalah SK Walikota Palembang nomor 335 tahun 2013 tentang subsidi sambungan air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tertanggal 19 juli 2013, dan Surat keputusan Walikota Palembang Nomor 16 Tahun 2015 perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 untuk penyertaan modal kepada PDAM tirta Musi tertanggal 28 April 2015. Selain kedua dasar hukum tersebut terdapat juga pedoman pengelolaan program Hibah Air Minum APBN. Sejauh ini program hibah telah dilaksanakan mengikuti dan sesuai pedoman tersebut.

2. Integrasi

Indikator yang digunakan adalah melihat proses sosialisasi baik pada MBR maupun pada pegawai Pelaksana

program berdasarkan wawancara dan observasi, diketahui bahwa proses sosialisasi kepada MBR dilakukan oleh tim teknis lapangan PDAM Tirta Musi melalui perwakilan kantor cabang masing-masing dengan mengerahkan staff pelaksana mendatangi rumah calon penerima hibah dan menjelaskan tentang program ini, untuk selanjutnya informasi bisa diteruskan ke masyarakat yang lain dari mulut ke mulut karena tidak semua bisa dijangkau. Sosialisasi juga dilakukan melalui radio dan surat kabar. Setelah proses survey dilakukan pendataan dibagi dilakukan pemerataan.

Sosialisasi dilakukan dengan menjelaskan tujuan dan tata cara pengurusan bantuan hibah air minum, hasil sosialisasi mendapatkan antusiasme yang besar dari warga, mereka dengan segera mengurus ke PDAM untuk memperoleh subsidi. Dari pihak pelaksana sendiri telah diberikan pelatihan dan pengarahan terhadap program ini di awal.

3. **Adaptasi**

a. Peningkatan pengetahuan pelaksana

Petugas pelaksana di awal program telah mendapatkan pelatihan surveyor dari pemerintah Australia dalam program hibah Air minum MBR yang didanai Aus Aid dan petugas yang melaksanakan program ini tidak mengalami pergantian sejak awal sampai sekarang, karena telah terbiasa dan telah tau dengan tugasnya jadi tidak terkendala.

b. Sarana dan prasarana

Tidak ada sarana dan prasarana khusus dalam program ini semua menggunakan sarana yang ada pada PDAM Tirta Musi. Untuk pemasangan pipa dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk PDAM Tirta Musi (rekanan) yang memang bertugas sesuai keahliannya. Sehingga tidak ada kendala yang dihadapi.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Hibah air minum bagi masyarakat Berpenghasilan rendah di kota Palembang tahun 2015

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota Palembang digunakan indikator menurut Sterr yaitu Karakteristik organisasi, Karakteristik lingkungan, Karakteristik pekerja, serta Kebijakan dan praktek manajemen

1. **Analisis karakteristik organisasi**

a. Struktur organisasi

Koordinasi yang dilakukan dalam program hibah air minum berupa adanya struktur baru yang dibentuk, juga terdapat job desk untuk masing-masing pelaksana dan schedule kerja. Data tim pelaksana program bisa dilihat pada Lampiran keputusan direksi PDAM Tirta Musi Palembang nomor 06 tahun 2016 tentang tim teknis pengelolaan program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Kota Palembang. Untuk selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya pihak PDAM melakukan koordinasi pada pihak pemerintah setempat untuk mengetahui data MBR di daerah masing-masing. Namun menurut informasi yang diperoleh dari ketua RT setempat koordinasi ini tidak dijalankan, mereka mengetahui program ini setelah dilakukan pemasangan di rumah warga dan pemasangan plang di lorong tempat mereka tinggal.

b. Teknologi

Teknologi yang digunakan dalam program hibah air minum, untuk mengetahui lokasi penerima hibah PDAM ini menggunakan teknologi pemetaan Arc GIS. Dengan program ini, dapat dilihat lokasi rumah calon pelanggan secara jelas menggunakan media internet dan komputer.

2. Karakteristik Lingkungan

a. Eksternal

Dari lingkungan eksternal, masyarakat penerima program ini sangat antusias ingin mengikuti program hibah air minum. Namun karena keterbatasan *idle capacity* (kemampuan pengelolaan cadangan air) di PDAM Tirta Musi dan juga keterbatasan dana yang disetujui maka beberapa diantara yang sudah mengajukan harus menunggu giliran untuk mendapatkan hibah ini karena pembagiannya per kecamatan dibatasi.

b. Internal

Dari Lingkungan internal terdapat kendala internal dalam pelaksanaan program hibah air minum ini, yaitupada saat pemasangan, standar pemasangan baru oleh pihak ketiga (koperasi, cv) tidak sesuai dengan yang dikehendaki/ standar. Akhirnya tim teknis melakukan koordinasi dengan pengawas di lapangan dengan manager unit, contoh kendala misalnya dari beberapa SR tidak standar, cor semennya, perlengkapan accesoriesnya,

meteranya. Penentuannya koperasi dan CV ini sudah ada Mou nya. Di sisi lain, menurut warga pada saat dilakukan pemasangan meteran dan pipa mereka mengeluarkan uang juga untuk pihak pemasang, ini sifatnya sukarela bukan diharuskan.

3. Karakteristik Pekerja

a. Kemampuan individu

Pegawai pelaksana program hibah air minum ini, telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan *job desk* masing-masing, apabila ada kendala di lapangan mereka melaporkan kepada manajer pengendalian kehilangan air sebagai ketua program hibah air minum MBR. Salah satu permasalahan adalah adanya komplain dari masyarakat kalau mereka telah mendaptar melalui oknum yang mengaku dari pihak PDAM. Padahal tidak pernah dilakukan penyetoran dilapangan. Untuk mengatasi penipuan tersebut, pada saat survey tim pelaksana mengingatkan kepada para calon penerima hibah untuk tidak membayar di lapangan.

b. Prestasi kerja

Keberhasilan tim teknis pelaksanaan program hibah air minum ini sudah teruji dengan keberhasilan mereka menjalankan program hibah dari pendanaan Aus aid. Sehingga saat ini mereka tinggal meneruskan sampai tahun 2016. Namun disayangkan karena keterbatasan *idle capacity* untuk tahun 2017 program ini tidak dapat dilanjutkan.

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Pelaksanaan program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Palembang tahun 2015 memiliki pedoman pengelolaan yang telah dibukukan yang memuat standar, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program ini serta tata cara pembiayaan. Proses pengarahan dan pelatihan dilakukan oleh pimpinan di awal kegiatan dilaksanakan. Dalam hal pengawasan ada Sistem Pengendalian Internal dari PDAM. Pelaksanaan di lapangan yaitu terletak pada80% peran unit, karena pemasangan berada di masing-masing unit. Semuanya harus lengkap dan sesuai standar. Jika tidak standar, maka akan dikoordinasikan dengan unit. Pengawasan juga melibatkan BPKP yang juga melakukan pengecekan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketiga indikator yaitu; pencapaian tujuan, adaptasi dan integrasi dalam menilai efektifitas dapat dilihat bahwa semua indikator telah terpenuhi dengan demikian dapat dikatakan program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota Palembang tahun 2015 telah efektif dilaksanakan. Masyarakat merasakan manfaat yang besar dari program ini. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang dihadapi berupa faktor-faktor penghambat pelaksanaan program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu; masalah ketepatan waktu disebabkan oleh jumlah masyarakat penerima yang dibatasi, akibatnya masyarakat yang mendaftar tidak seluruhnya bisa dipenuhi untuk ikut program ini, koordinasi dengan pihak terkait di luar program dalam hal ini koordinasi dengan RT setempat yang tidak dilakukan dan keterbatasan idle capacity yang membuat program ini tidak bisa berkelanjutan. Karena masalah utamanya adalah kurangnya idle capacity. Maka, pemerintah perlu membangun instalasi baru untuk pemenuhan idle capacity untuk keberlanjutan program ini.Selain itu, agar semua kendala tersebut dapat diatasi diperlukan kerjasama dan koordinasi antar semua pihak terkait, terutama lini depan masyarakat yaitu RT, RW dan tokoh masyarakat yang dapat diajak untuk mensosialisasikan program ini